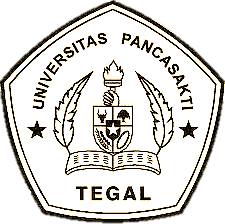
**PROSES PEMBUKTIAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA**

****

# SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal**

Oleh :

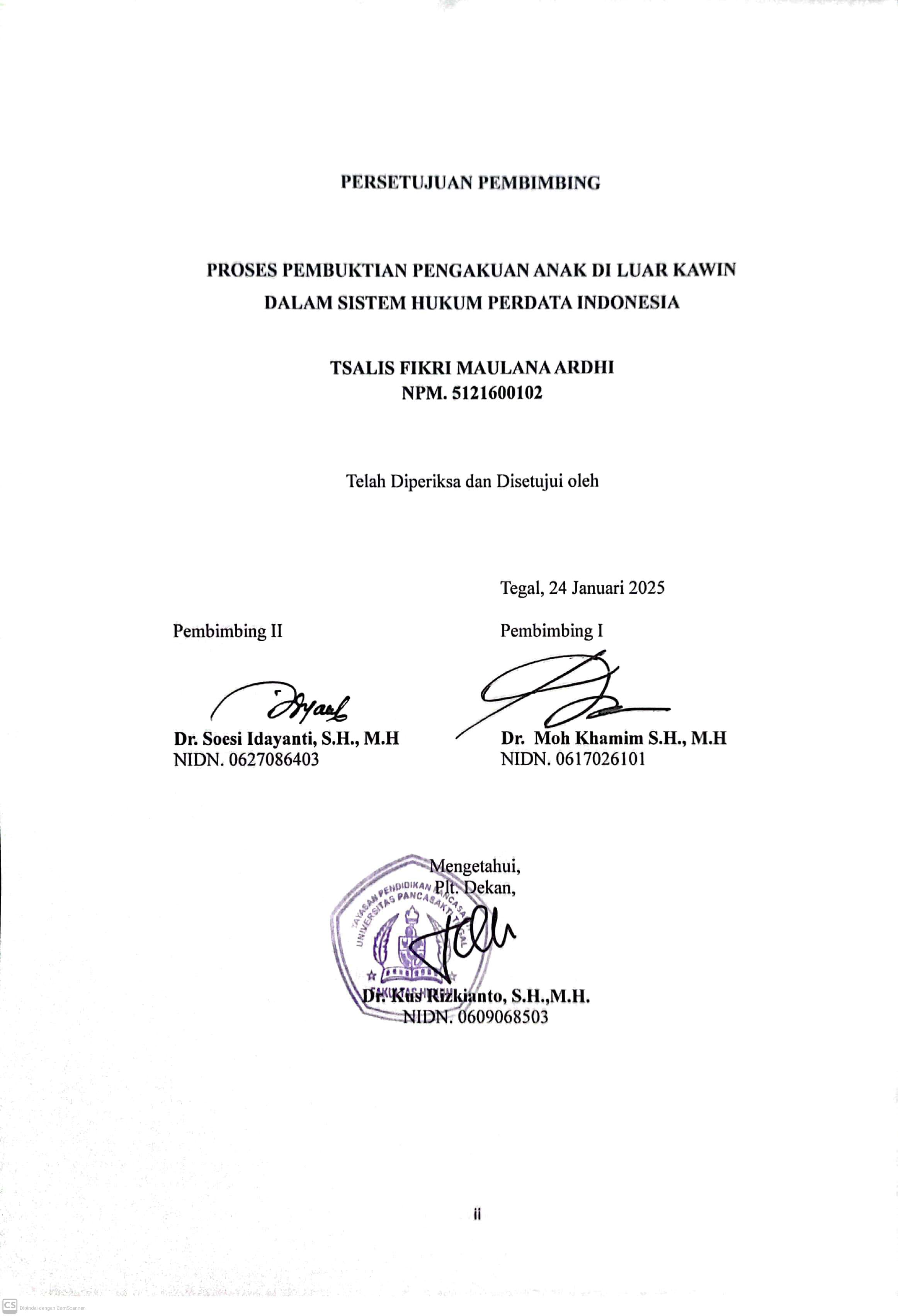
**TSALIS FIKRI MAULANA ARDHI**

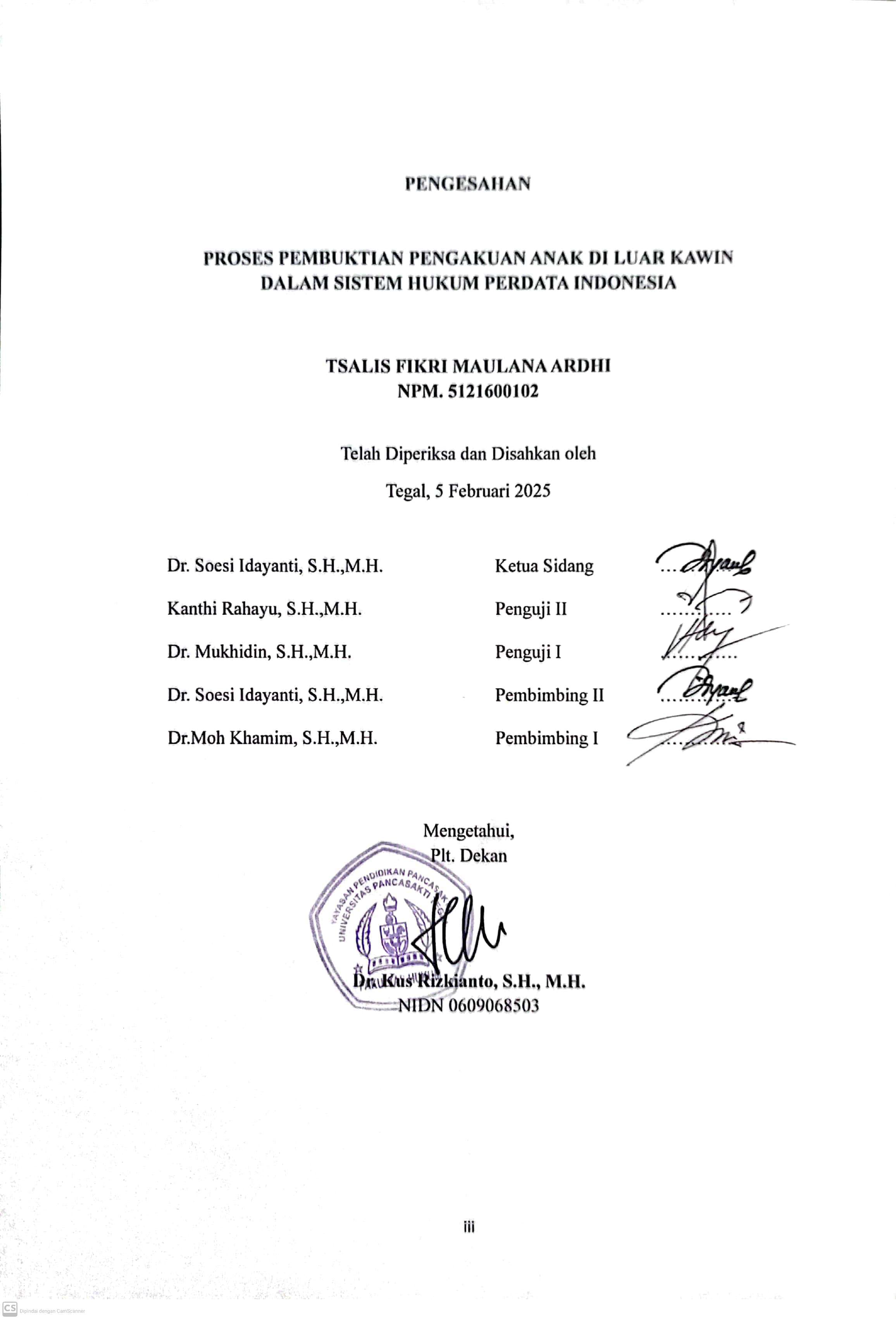
**NPM. 5121600102**

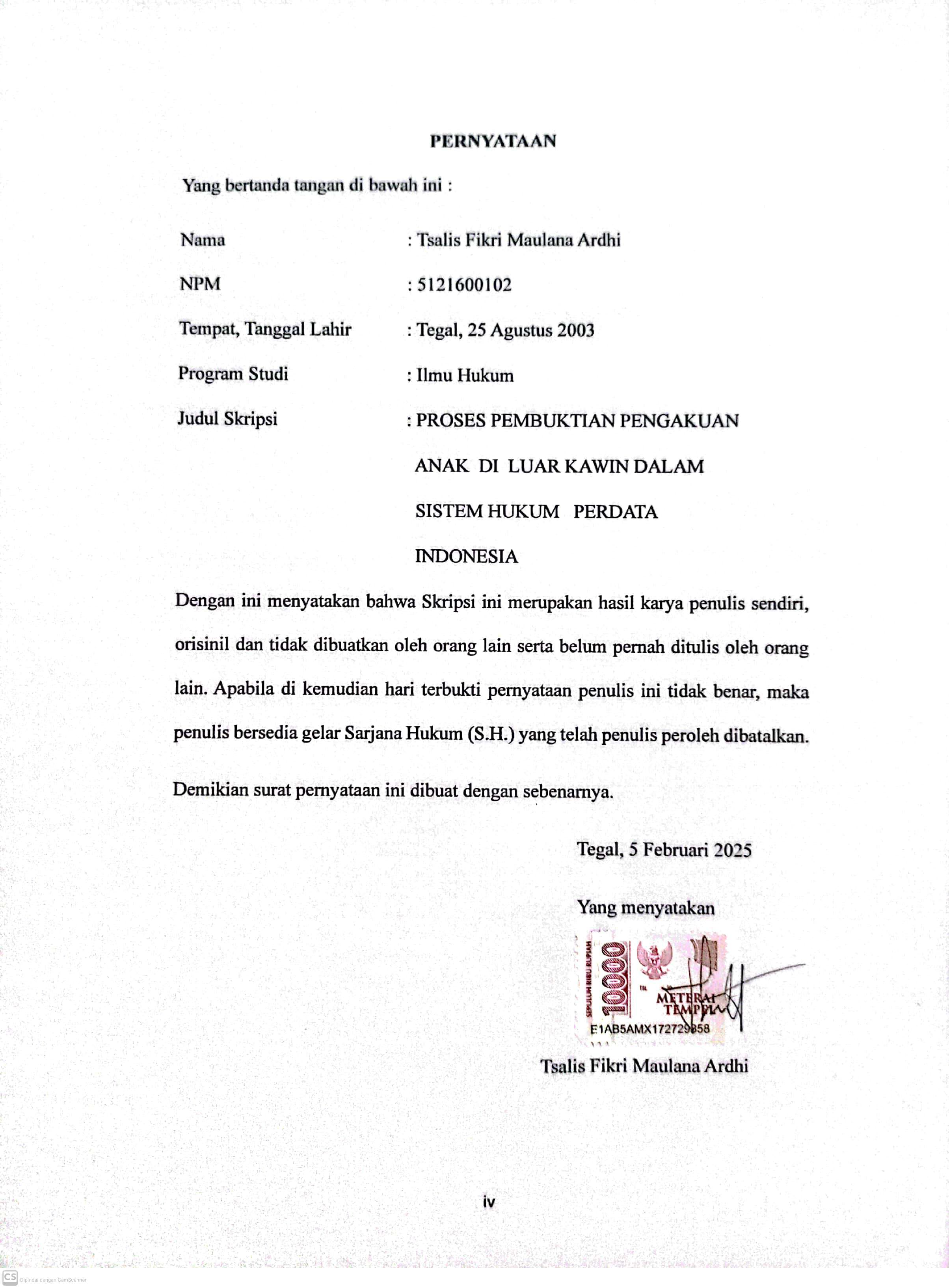
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**







# ABSTRAK

Pengakuan anak di luar kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata, pengakuan ini menciptakan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua yang sebelumnya tidak ada. Anak di luar kawin awalnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, sesuai Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan. Namun, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memungkinkan hubungan hukum dengan ayah biologis melalui pengakuan sukarela atau bukti sah, seperti tes DNA. Pembuktian status anak luar kawin membutuhkan prosedur hukum ketat, termasuk dokumen resmi, kesaksian, atau hasil tes ilmiah, dan memberikan anak hak keperdataan seperti waris, nafkah, dan nama keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pengakuan anak di luar kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia dan mendeskripsikan prosedur pembuktian status hukum anak luar kawin. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan datanya melalui teknik pengumpulan data sekunder, atau data studi kepustakaan, dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan anak di luar kawin tidak hanya mengubah status keperdataan mereka, tetapi juga memberikan akses terhadap hak waris dan perlindungan hukum yang lebih baik. Dengan demikian, implikasi hukum dari pengakuan ini sangat signifikan bagi kesejahteraan anak-anak tersebut dalam sistem hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Pengakuan, Sistem Hukum Perdata, Pembuktian**

# *ABSTRACT*

*Recognition of illegitimate children in the Indonesian civil law system involves legal, social, and cultural aspects. Based on Article 280 of the Civil Code, this recognition creates a civil relationship between the child and the parents that previously did not exist. An illegitimate child initially only had a civil relationship with his/her mother, according to Article 43 Paragraph (1) of the Marriage Law. However, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 allows for a legal relationship with the biological father through voluntary recognition or valid evidence, such as a DNA test. Proving the status of an illegitimate child requires strict legal procedures, including official documents, testimony, or scientific test results, and gives the child civil rights such as inheritance, maintenance, and a family name.*

*This study aims to examine the mechanism for recognizing illegitimate children in the Indonesian civil law system and to describe the procedure for proving the legal status of illegitimate children. The type of research uses library research. The normative legal research approach, with data collection techniques through secondary data collection techniques, or library study data, and is analyzed qualitatively.*

*The results of this study indicate that the recognition of illegitimate children not only changes their civil status, but also provides access to inheritance rights and better legal protection. Thus, the legal implications of this recognition are very significant for the welfare of these children in the existing legal system. Based on the results of this study, it is expected to be a source of information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.*

***Keywords: Children Out of Wedlock, Recognition, Civil Law System, Evidence***

# MOTO

“ Kegagalan Terjadi Karena Terlalu Banyak Berencana, Tetapi Sedikit Berpikir “

“ Kebaikan Adalah Bahasa Universal, Sebarkanlah “

“ Teruslah Berani, Dunia Menunggu Keajaibanmu “

# PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya tulis ini kupersembahkan kepada mereka yang selalu menjadi cahaya, kekuatan, dan inspirasi di setiap langkah perjalanan hidup penulis :

1. Persembahan ini saya tujukan untuk kedua orang tua tercinta, Abah Suwandi dan Mamah Erna Dwi Ratnayanti yang telah memberikan segala cinta, doa, dan pengorbanan tanpa henti. Tak terhitung malam penuh keletihan yang mereka lewati demi memastikan saya dapat terus mengejar impian. Tanpa kasih sayang, dukungan, dan kepercayaan mereka, saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan perjalanan ini. Semoga apa yang saya raih ini menjadi kebanggaan bagi mamah dan abah, meski terkadang tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih yang mendalam. Untuk mamah dan abah, kalian adalah alasan terbesar saya berdiri hingga saat ini. Terima kasih atas segala segalanya.
2. Ucapan terima kasih penulis kepada kakak saya, Ikhda Ni’ami Fauziyatunisa. Terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya yang selalu hadir disetiap Langkah perjuangan adikmu ini.
3. Terima kasih kepada diriku sendiri, yang telah berjuang dengan segala keteguhan hati, meskipun lelah dan ragu sering datang menghampiri. Terima kasih telah terus bertahan di tengah-tengah kesulitan dan tekanan, tidak menyerah meskipun jalan terasa berat. Semua kerja keras, malam tanpa tidur, dan usaha tanpa henti telah membentuk diriku menjadi lebih kuat. Skripsi ini adalah bukti dari ketekunan dan semangat yang tak kenal lelah. Semoga pencapaian ini menjadi titik awal dari perjalanan yang lebih panjang dan penuh makna.
4. Terima kasih untukmu, Jihan Ambaroh sayang yang selalu ada di sampingku sepanjang perjalanan ini. Setiap kata penyemangat, setiap dukungan tanpa henti, dan setiap senyuman yang kau beri, telah menjadi kekuatan besar bagi saya. Ketika saya merasa lelah dan ragu, kamu selalu hadir untuk mengingatkan bahwa saya mampu melewati semuanya. Terima kasih sudah sabar dan memahami, serta selalu mendampingiku meski seringkali saya tenggelam dalam dunia skripsi ini. Kamu adalah sumber kebahagiaan dan semangat yang tak ternilai. Skripsi ini juga adalah hasil dari dukungan dan cintamu.
5. Terima kasih untukmu, teman kuliah terbaikku kelas B Angkatan 2021 terutama Moh. Sandy Ari Susanto, Roy Priyadi, dan Haydar Ali Rabani yang selalu setia menemani setiap langkah dalam perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi tempat curhat, sumber tawa, dan penyemangat saat aku merasa hampir menyerah. Semua perjuangan, diskusi, dan momen-momen sulit yang kita hadapi bersama membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Tanpa dukungan dan kebersamaanmu, aku tidak tahu apakah aku bisa sampai di titik ini. Terima kasih telah berbagi pengetahuan, waktu, dan energi tanpa pamrih. Semoga persahabatan ini terus berkembang dan kita bisa merayakan banyak kesuksesan bersama di masa depan.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman KKN Desa Karangjoho Purbalingga tahun 2024, pengalaman yang kita Jalani selama masa KKN telah menjadi Pelajaran bagi saya mengenai apa itu kemandirian.

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT., Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa Rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqullah, M. Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. Moh. Khamim, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Ibu Selviany, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Bapak Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Yang telah berkenan dan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah berkenan memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan dan arahan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sebagai amal jariyah.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan penuh kesabaran dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan do’a baik serta dukungan moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 Ilmu Hukum ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan penulis yang telah memberikan dukungan serta menemani penulis dikala suka maupun duka.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembacanya.

Tegal, 5 Februari 2025

Tsalis Fikri Maulana Ardhi

DAFTAR ISI

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc190197926)

[PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc190197926)

[PENGESAHAN iii](#_Toc190197926)

[PERNYATAAN i](#_Toc190197926)v

[ABSTRAK v](#_Toc190197930)

[*ABSTRACT* vi](#_Toc190197931)

[MOTO vii](#_Toc190197932)

[PERSEMBAHAN viii](#_Toc190197933)

[KATA PENGANTAR x](#_Toc190197934)

[DAFTAR ISI x](#_Toc190197934)ii

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc190197935)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc190197937)

[B. Rumusan Masalah 8](#_Toc190197938)

[C. Tujuan Penelitian 8](#_Toc190197939)

[D. Urgensi Penelitian 8](#_Toc190197940)

[E. Tinjauan Pustaka 10](#_Toc190197941)

[F. Metode Penelitian 13](#_Toc190197942)

[G. Sistematika Penulisan Laporan 15](#_Toc190197943)

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 17](#_Toc190197944)

[A. Tinjauan Umum Tentang Anak 17](#_Toc190197946)

[1. Pengertian Anak 17](#_Toc190197947)

[2. Macam-Macam Anak 19](#_Toc190197948)

[3. Pengertian Anak Luar Kawin 21](#_Toc190197949)

[4. Kriteria dan Penyebab Anak Luar Kawin 26](#_Toc190197950)

[B. Kedudukan Waris Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Hukum Perdata 27](#_Toc190197951)

[1. Bagian-Bagian Ahli Waris Anak Luar Kawin 28](#_Toc190197952)

[2. Hubungan Hukum Anak Terhadap Orang Tua 34](#_Toc190197953)

[C. Tinjauan Hak Pengakuan dan Status Keperdataan Anak Luar Kawin 35](#_Toc190197954)

[1. Pengakuan Anak Luar Kawin 35](#_Toc190197955)

[2. Status Keperdataan Anak Luar Kawin 40](#_Toc190197956)

[3. Hak Keperdataan Anak Luar Kawin 42](#_Toc190197957)

[D. Tinjauan Pengertian Perkawinan dan Pengesahan Anak 44](#_Toc190197958)

[1. Pengertian Perkawinan 44](#_Toc190197959)

[2. Tinjauan Umum Pengesahan Anak 49](#_Toc190197960)

[BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51](#_Toc190197961)

[A. Pengakuan Anak di Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia 51](#_Toc190197963)

[B. Proses Pembuktian Status Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata 73](#_Toc190197967)

[BAB IV PENUTUP 84](#_Toc190197968)

[A. Simpulan 84](#_Toc190197970)

[B. Saran 85](#_Toc190197971)

[DAFTAR PUSTAKA 87](#_Toc190197972)

[LAMPIRAN 91](#_Toc190197973)

# BAB I

# PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Zaman sekarang ini, interaksi yang tidak terkendali di masyarakat terkadang menyebabkan anak-anak lahir tanpa ikatan perkawinan. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya nilai yang kini ditempatkan pada moralitas, prinsip-prinsip agama, dan praktik-praktik adat. Kaum muda khususnya tidak menyadari bahwa pergaulan seperti ini dapat menyebabkan bencana, aib, dan masalah hukum bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan lingkungan. Akibatnya, sudah menjadi hal yang umum untuk mendengar tentang penemuan bayi di berbagai lokasi, termasuk tempat pembuangan sampah yang ditinggalkan, dasar sungai, dan daerah yang sangat tidak sehat lainnya. Anak-anak ini tidak diragukan lagi lahir di luar perkawinan.[[1]](#footnote-2)

Kelahiran seorang anak dalam suatu perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Selain menjadi simbol penerus keturunan, anak juga dianggap sebagai bukti ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.[[2]](#footnote-3) Kelahiran anak luar kawin sering kali menimbulkan stigma sosial dan dianggap sebagai aib bagi keluarga.

Menurut hukum perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya diizinkan untuk menjalin hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa anak dan ayah tidak memiliki hubungan hukum dengan cara apa pun, termasuk warisan atau biaya hidup dan pendidikan anak. Untuk individu yang tercakup dalam hukum perdata, seorang ayah dapat mengakui seorang anak dengan persetujuan ibu. Anak di luar kawin pada dasarnya berada di luar ikatan keluarga karena ia tidak memiliki interaksi yang baik dengan kerabat orang tuanya. Namun, dibandingkan dengan anak yang sah, anak dari hubungan di luar kawin memiliki status yang lebih rendah sehubungan dengan ibu dan ayahnya.[[3]](#footnote-4)

Hukum perlindungan anak yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia hanya sebatas mengatur perlindungan anak di dalam tataran konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan orang tua (alimentasi) oleh anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya yang umumnya ditemukan dalam beberapa sistem hukum baik menurut sistem “(Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, maupun di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan lain-lainnya)”.

Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan revolusioner dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan yang menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perubahan Pasal 43 ayat (1) berimplikasi terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia.[[4]](#footnote-5) Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 untuk mengatasi ketidakadilan hukum yang dialami oleh anak-anak yang lahir di luar kawin, yang sebelumnya tidak diakui secara hukum sebagai memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis mereka. Dalam putusan ini, MK menilai bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, karena menghilangkan hak anak untuk diakui secara hukum sebagai anak dari ayahnya jika lahir di luar perkawinan yang sah. Keputusan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, memastikan bahwa mereka mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang setara dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi anak-anak tersebut, tetapi juga mendorong tanggung jawab orang tua untuk mengakui dan memenuhi kewajiban mereka terhadap anak-anak yang lahir di luar kawin.[[5]](#footnote-6)

Kitab Undang‐Undang Hukum Perdata terdapat peraturan-peraturan khusus dan istimewa mengenai perhubungan antara anak luar kawin dengan orangtua yang mengakuinya selaku anak. Di dalam Pasal 272 KUH Perdata dinyatakan bahwa: “tiap-tiap anak yang dibenihkan di luar perkawinan, kemudian dengan kawinnya bapak dan ibu biologisnya, maka anak tersebut menjadi anak sah apabila keduanya sebelum melakukan perkawinan telah mengakuinya menurut ketentuan undang‐undang yakni tercatat dalam akta kelahiran si anak atau di dalam akta perkawinan orang tuanya”. Hal ini menyiratkan bahwa pengakuan tersebut dicatat dalam akta perkawinan jika diberikan pada saat perkawinan kedua orang tua. Di mana ketentuan tentang pengakuan anak-anak mereka yang lahir atau lahir sebelum perkawinan mereka dimasukkan dalam akta perkawinan. Menurut pasal ini, kecuali jika anak tersebut merupakan hasil dari hubungan yang dianggap zina atau sumbang, setiap anak yang lahir di luar perkawinan dapat diakui dan disahkan oleh kedua orang tuanya. Di sini, “perzinahan” mengacu pada hubungan seksual antara dua orang, yang salah satunya telah melakukan perkawinan secara sah dengan orang lain, dan “sumbang” mengacu pada hubungan antara orang-orang yang tidak diizinkan untuk kawin.[[6]](#footnote-7)

Pada Pasal 280-Pasal 289 KUHPerdata, pengakuan terhadap anak luar kawin diatur, dan pengakuan tersebut dapat dilakukan oleh bapak dan/atau ibu anak tersebut. Dalam Pasal 280 KUHPerdata disebutkan “bahwa pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan dapat dilakukan oleh bapak dan/atau ibunya. Hal ini berarti baik ayah maupun ibu memiliki hak untuk mengakui anak luar kawin sebagai anak sah mereka. Pengakuan oleh ibu terhadap anak luar kawin ini merupakan perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak mengenal anak di luar kawin terhadap ibu”. Dengan demikian maka dalam ketentuan KUHPerdata yang mengizinkan ibu untuk melakukan pengakuan anak luar kawin memberikan hak dan kewajiban yang sama seperti ayah dalam proses pengakuan anak. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan dan hak-hak yang sama bagi anak, tanpa membedakan apakah pengakuan berasal dari ibu atau ayahnya.

Kedudukan Anak Selama Perkawinan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan klarifikasi tentang posisi anak yang lahir atau dibesarkan selama masa perkawinan. “Menurut pasal ini, setiap anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama periode perkawinan memiliki hak untuk mendapatkan figura bapak dari suami ibunya.” Hubungan Perdata Anak dengan Ayah Pasal 250 KUH Perdata menjelaskan “bahwa anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan otomatis memperoleh suami sebagai ayahnya”. Ini berarti bahwa anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga tidak ada perbedaan substansial dalam status keperdataan antara anak yang lahir dalam perkawinan sah dan anak yang lahir di luar perkawinan.

Pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan merupakan hal yang umum terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingginya persentase anak yang belum kawin di Indonesia dan keinginan orang tua untuk memberikan status hukum kepada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Sekitar 1,3 juta anak di Indonesia tidak tercatat dalam akta kelahiran, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2020. Sekitar 80% dari jumlah tersebut, atau satu juta anak, belum melakukan perkawinan.

Kebutuhan akan kejelasan hukum dan persamaan hak bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah menjadi pendorong di balik banyaknya permohonan pengesahan anak di pengadilan.[[7]](#footnote-8) Tidak hanya perselingkuhan di luar perkawinan yang dapat mengakibatkan kelahiran anak di luar kawin, tetapi situasi lain, seperti penerapan perkawinan yang dilakukan semata-mata berdasarkan kebiasaan dan tidak didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, juga dapat mengakibatkan kelahiran anak di luar kawin. Menurut ketentuan Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan “bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil”. Dalam Pasal 81 KUHPerdata disebutkan, “bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil”.[[8]](#footnote-9) Hampir tiap persekutuan masyarakat di Indonesia, mengenal anak “anak sah” dan “anak tidak sah atau anak luar kawin”. Masyarakat memiliki penyebutan khusus bagi anak luar kawin seperti: “*anak haram, anak haram jadah, anake wong ora nggenah, anak kowar, anak kampang, anak astral dan sebagainya*. Penyebutan tersebut sekaligus menjadi stigma bagi si anak luar kawin”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) lebih lanjut menekankan perbedaan antara anak sah dan anak luar kawin. Menurut Pasal 250 KUHPerdata, yang mengatur tentang anak sah dan juga anak luar kawin: “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Secara *a-contrario*, bunyi Pasal 250 KUHPerdata tersebut dapat diartikan bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau ditumbuhkan di luar perkawinan termasuk kategori anak luar kawin.

R.Soetojo Praworohamodjojo, menjelaskan perbedaan antara anak yaitu: Anak yang sah yaitu merupakan anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. dan Anak yang tidak sah yaitu yang dilahirkan diluar perkawinan. Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penulis menarik beberapa permasalahan yang akan dibahas dari penulisan proposal skripsi yang berjudul : “**Proses Pembuktian Pengakuan Anak Di Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia”**

# Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengakuan Anak di Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia ?
2. Bagaimana Proses Pembuktian Status Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata ?

# Tujuan Penelitian

Setiap penulisan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan terhadap penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengkaji Pengakuan Anak di Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia.
2. Untuk Menganalisis Pembuktian Status Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata.

# Urgensi Penelitian

Mengapa Penelitian mengenai implikasi hukum pengakuan anak di luar kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia sangat penting, karena mengingat tingginya jumlah anak luar kawin yang tidak terdaftar secara resmi mencapai sekitar 1 juta anak di Indonesia. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

* 1. **Secara Teoritis :** Pengakuan anak di luar kawin merupakan isu penting dalam konteks hukum perdata Indonesia yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak anak. Dalam sistem hukum yang berlaku, anak yang lahir di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sedangkan hubungan dengan ayahnya tergantung pada pengakuan resmi Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi status keperdataan anak, termasuk hak waris dan akses terhadap perlindungan sosial. Manfaat penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana regulasi yang ada, seperti KUH Perdata dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dapat diperbaiki untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak tersebut. Dengan memahami implikasi hukum ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih adil dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat.
  2. **Secara Praktis :** Urgensi penelitian ini juga sangat relevan mengingat tingginya angka anak luar kawin di Indonesia. Data menunjukkan bahwa sekitar 1 juta anak luar kawin tidak terdaftar dalam akta kelahiran, yang berdampak pada akses mereka terhadap layanan dasar dan hak-hak keperdataan. Manfaat penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan akses pendaftaran akta kelahiran bagi anak luar kawin dan memperkuat mekanisme perlindungan hukum yang ada. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan program-program sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengakuan hukum bagi anak-anak tersebut, sehingga mereka tidak lagi terdiskriminasi dan memiliki status hukum yang jelas.

# Tinjauan Pustaka

Berikut adalah tinjauan pustaka dari 3 (tiga) penelitian yang memiliki kemiripan dalam penelitian berkaitan dengan Proses Pembuktian Pengakuan Anak Di Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia :

Pertama Penelitian yang dilakukan Yuli Hilmasari (2014), *“Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata”.*[[9]](#footnote-10) Yang dipublikasikan melalui sebuah karya tulis skripsi yang membahas mengenai permasalahan hukum anak luar kawin menurut hukum Islam dan KUH Perdata yang menjelaskan syarat-syarat pengakuan anak luar kawin ditinjau dari Hukum Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan syar’i yaitu suatu pendekatan dengan mengambil hukum-hukum Islam dalam Alqur’an dan hadis khususnya berkaitan dengan judul yang penulis angkat dan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara Deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan dalam skripsi ini kemudian menganalisa hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya”. Sedangkan perbedaan dalam skripsi peneliti akan membahas permasalahan mengenai hal apa yang menjadi Pengakuan Anak di Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia dan membahas Pembuktian Status Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata. Karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang memuat hak-hak anak belum menjamin perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam hukum indonesia Metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode pengumpulan data yuridis normatif.

Kedua Penelitian yang dilakukan SriRezeki, (2009). *“Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer: 20/PDT. P/2009/PN. JKT. PST)”.* [[10]](#footnote-11) Yang dipublikasikan melalui sebuah karya tulis skripsi yang membahas mengenai permasalahan analisis kasus penetapan pengadilan negeri jakarta pusat No. 20/PDT. P/2009/PN. JKT. PST. Dimana dalam penetapan tersebut adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan kelahiran seorang anak luar kawin yang terlambat didaftarkan di kantor catatan sipil. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan perbedaan dalam skripsi peneliti akan membahas permasalahan mengenai hal apa yang menjadi Pengakuan Anak di Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia dan membahas Pembuktian Status Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata. Karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang memuat hak-hak anak belum menjamin perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam hukum indonesia. Metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode pengumpulan data yuridis normatif.

Ketiga Penelitian yang dilakukan Yahya Ibadu Rahman, et.al (2024). *“Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”*.[[11]](#footnote-12) Yang dipublikasikan melalui sebuah jurnal yang membahas mengenai perbedaan dan kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam mengatur status serta hak-hak anak luar kawin, khususnya terkait nasab, waris, dan perwalian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau dogmatik dan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan perbedaan dalam skripsi peneliti akan membahas permasalahan mengenai hal apa yang menjadi Pengakuan Anak di Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia dan membahas Pembuktian Status Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata. Karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang memuat hak-hak anak belum menjamin perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam hukum indonesia. Metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode pengumpulan data yuridis normatif.

# Metode Penelitian

* 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).[[12]](#footnote-13) Karena penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau data sekunder. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan lebih banyak data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu suatu metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menilai peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik hukum yang diteliti. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan atau doktrinal.[[13]](#footnote-14) Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan alasan-alasan hukum yang dapat digunakan untuk memutuskan apakah suatu kejadian itu benar atau salah dan bagaimana hukum harus menafsirkannya.

1. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat beberapa pendapat para sarjana dan ahli. Data sekunder ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer Bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:
   * 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
     2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
     3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Sumber Informasi Hukum Sekunder Penelitian dapat dibantu oleh dokumen-dokumen hukum sekunder, yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan wawasan dan pemahaman tentang bahan hukum lainnya, melengkapi informasi hukum primer dan sekunder.
4. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian yang digunakan peneliti ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, atau data studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu studi yang dilakukan untuk memperoleh melalui serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, memilih, mencatat, dan mengutip buku-buku referensi atau literatur, dan menelaah peraturan perundang-undangan, juga informasi lainya yang berhubungan dengan penelitian ini.[[14]](#footnote-15)

1. Metode Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskriptif dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari bahan dan bukan kuantitas.[[15]](#footnote-16)

# Sistematika Penulisan Laporan

Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan.** Bab ini memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dicari jawabanya, tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat, manfaat penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika laporan penelitian.

**BAB II Landasan Konseptual.** Bab ini menguraikan : mendeskripsikan tentang Tinjauan Umum tentang anak luar kawin (Pengertian anak luar kawin, Kriteria dan Penyebab anak luar kawin, Hubungan hukum anak terhadap orang tua), Tinjauan Pengertian Perkawinan, Tinjauan pengakuan anak luar kawin.

**BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan.** Adapun yang menjadi pokok pembahasan dari permasalahan skripsi ini sebagai berikut :Pengakuan Anak di Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia, dan Proses Pembuktian Status Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata.

**BAB IV Penutup*.*** Bab ini didalamnya akan memuat simpulan yang merupakan suatu jawaban dari permasalahan dan asumsi yang telah dikemukakan oleh penulis, dan saran.

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## **Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **Pengertian Anak**

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 Pasal satu ayat (1) Setiap orang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan, dianggap sebagai anak. Di sisi lain, anak-anak didefinisikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai mereka yang belum melakukan perkawinan dan belum berusia dua puluh satu (21) tahun. Anak memiliki hak dan martabat sebagai manusia yang harus dihormati, serta merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Selain sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, anak merupakan tunas-tunas bangsa yang potensial. Anak yang memiliki potensi sebagai sumber daya manusia untuk kemajuan negaranya perlu dilindungi dan dibimbing.[[16]](#footnote-17)

Anak-anak diklasifikasikan sebagai kelompok yang rapuh dan lemah. Karena ketergantungannya pada orang dewasa dan usianya yang belum matang, perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual, kelompok ini sangat berbahaya. Pemikiran mereka masih belum matang, dan mereka tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bimbingan dan perlindungan orang dewasa. Oleh karena itu, selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua mereka.[[17]](#footnote-18)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) membatasi seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk dianggap sebagai anak-anak atau belum dewasa. Menurut Pasal 330, yang menyatakan : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”. KUHPerdata (BW) memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur dua puluh satu tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang menyatakan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umumnya maka seseorang dapat saja diasosiakan dengan istilah anak”.

### **Macam-Macam Anak**

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membagi beberapa macam anak ke dalam beberapa bagian, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya pengertian anak secara umum adalah seseorang di bawah usia tertentu yang belum pernah melakukan perkawinan dan belum dewasa. Batasan usia dicakup secara berbeda oleh sejumlah hukum dan peraturan di Indonesia. Anak-anak diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori menurut hukum dan peraturan di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Perkawinan, Hukum Islam, dan lainnya. Kategori-kategori ini meliputi :

1. “Anak Sah

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak sah dapat bagian warisan, dan dibuktikan dengan adanya akta lahir, jika tidak ada akta lahir, harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan pengadilan.[[18]](#footnote-19)

1. Anak Luar Kawin

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dikenal sebagai anak luar kawin. Anak yang lahir di luar perkawinan dapat diklasifikasikan sebagai anak yang diakui atau tidak diakui. Hubungan antara pria dan wanita yang bukan suami istri atau saudara sedarah dapat dianggap sebagai anak luar kawin. Hubungan laki-laki, yang salah satunya sudah dalam perkawinan yang sah, adalah sumber keturunan luar kawin yang tidak diakui. Meskipun mereka hanya memiliki sepertiga dari hak anak kandung (dengan asumsi mereka memilikinya), anak-anak yang lahir di luar perkawinan berhak untuk mewarisi uang orang tua mereka. Bagian mereka adalah setengah, dan paling banyak tiga perempat, jika mereka bukan orang tua kandung.

1. Anak Sumbang dan Anak Zina

Anak-anak yang lahir dari hubungan di luar kawin antara seorang pria dan seorang wanita di mana salah satu atau keduanya melakukan perkawinan dengan orang lain dikenal sebagai anak zina. Meskipun mereka tidak berhak mewarisi dari orang tua mereka, anak zina berhak mendapatkan tunjangan. Anak-anak yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang secara hukum dilarang untuk kawin dikenal sebagai anak Sumbang. Undang-Undang ada larangan untuk saling melakukan perkawinan.

1. Anak Asuh

Anak Asuh adalah anak yang orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tumbuh kembangnya secara wajar, sehingga mereka diasuh oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan pengarahan, pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Anak asuh dapat mewarisi kekayaan orang tua asuh mereka melalui sumbangan atau surat wasiat, tetapi mereka tidak mewarisinya sendiri”. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pasal 1 angka (11) Undang-Undang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa pengasuhan anak oleh orang tua kandung adalah kuasa asuh, yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik dan memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”. Kewajiban orang tua tetap melekat meski perkawinan keduanya putus karena perceraian. Tanggungjawab orang tua terhadap anak ditegaskan dalam “Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri”. Disebutkan pula dalam Pasal 26, kewajiban orang tua meliputi 3 hal;

1. “Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

### **Pengertian Anak Luar Kawin**

Anak-anak yang dibuat atau dilahirkan di luar perkawinan yang sah dikenal sebagai anak luar kawin. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan “anak luar kawin” dalam dua cara. Pertama, anak-anak yang dihasilkan di luar perkawinan sebagai akibat dari perzinahan dan anak-anak yang tidak sah dianggap sebagai anak luar kawin dalam arti luas. Kedua, anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang diakui secara hukum, khususnya keturunan zina dalam arti sempit.

Undang-undang sendiri tidak dengan tegas mengatakan siapa yang dapat dikatakan anak luar kawin, tetapi dari pasal 272 BW dapat disimpulkan, “bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zina dan anak-anak sumbang. Menurut Paul Scholten, pada umumnya yang disebut anak luar kawin adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah”.[[19]](#footnote-20)

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan orang tua setelah ayahnya meninggal atau bercerai tidak selalu dianggap tidak sah karena anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah pembubaran perkawinan dan dibesarkan oleh ayahnya ketika ibunya masih terikat dalam perkawinan yang sah dianggap sah. (Pasal 255 BW). Karena sistem BW secara teoritis hanya memberikan hak waris kepada individu yang memiliki ikatan formal dengan pewaris, hukum perdata barat mewajibkan ayah untuk mengakui secara hukum anak yang lahir di luar perkawinan. Anak luar kawin memiliki hak untuk mewarisi kekayaan orang tua mereka karena hubungan hukum orang tua mereka dengan mereka ditetapkan melalui pengakuan.[[20]](#footnote-21) Namun pembentuk undang-undang tidak sepenuhnya konsekuen dengan pendirianya, karena walaupun anak luar kawin tersebut tidak diakui secara sah oleh ayah biologisnya, tetapi antara si anak luar kawin dengan ayahnnya ada juga hubungan hukum, sekalipun sifatnya terbatas, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 328 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa antara si ayah biologis dengan anak luar kawin ada kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah.[[21]](#footnote-22)

Menurut hukum, anak di luar kawin dianggap tidak sah; namun, mereka masih berhak atas hak-haknya, tetapi tidak berhak atas warisan, seperti hibah dan sedekah, karena mereka hanya dianggap memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, dengan pengecualian untuk anak luar kawin yang diakui. (pasal 862-866 KUH-Perdata). Selain itu, anak di luar kawin, termasuk anak yang lahir di luar kawin dan anak hasil perzinahan, berhak atas tunjangan atau hak atas tunjangan anak di luar kawin. (Pasal 867 B.W). Namun, karena orang tua mereka secara hukum dilarang untuk mengakui mereka, anak-anak yang lahir di luar kawin dan zina mungkin tidak memiliki ikatan hukum dengan ayah biologis mereka.

Merupakan tanggung jawab aparatur negara untuk menangani masalah ini dan memastikan kepastian hukum dalam kasus seperti ini yang terjadi di masyarakat yang menjadi perhatian. Oleh karena itu, langkah hukum diambil dalam hal ini melalui jalur hukum yang berlaku dan dapat diakses. Apabila undang-undang yang diuji materiil bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah selayaknya undang-undang tersebut diuji berdasarkan dokumen tersebut. Dalam hal ini, UUP No. 1 Tahun 1974, pasal 43 ayat (1), diajukan untuk diuji materiil.[[22]](#footnote-23)

Pasal 250 KUH Perdata, dijelaskan bahwa : “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”. Selanjutnya dalam pasal 272 dijelaskan bahwa “anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan pekawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”. Dan dalam pasal 280 dijelaskan lagi “bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengizinkan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan dengan tiga cara. “Pertama, pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. Kedua, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu”.

Di sisi lain, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak-anak yang lahir di luar perkawinan dapat dianggap sebagai anak sah asalkan orang tua mereka mengakuinya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 272, : “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”. Kemudian dalam Pasal 251 KUH Perdatamenguraikan bahwa: “Sahnya anakyang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami”. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:[[23]](#footnote-24)

1. “Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
2. Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatanganinya;
3. Bila anak itu dilahirkan mati”.

### **Kriteria dan Penyebab Anak Luar Kawin**

Menurut Kamus Ilmiah Populer, kriteria adalah persyaratan, ukuran, dan standar. Soni Dewi J. Budianto menyatakan bahwa kriteria berikut ini berlaku untuk anak yang lahir di luar perkawinan :

1. “Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh satu orang atau kedua ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terkait dalam ikatan perkawinan lain.
2. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam masa iddah setelah perceraiannya, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
3. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam proses perceraian (masih dalam ikatan perkawinan), sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
4. Anak yang lahir dari seorang ibu yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan tidak diketahui sang suami sebagai anaknya.
5. Anak yang dilahirkan dari orang tuanya akibat hukum negara tidak dapat melangsungkan perkawinan.
6. Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya sebagai anak temuan.
7. Anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah yang dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak melakukan perkawinan”.[[24]](#footnote-25)

Pengingkaran suami inilah yang menyebabkan munculnya anak di luar kawin. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita adalah anak sah dari kedua orang tuanya. Meskipun demikian, suami memiliki kewenangan untuk menggugat keabsahan anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) UU Perkawinan.

## **Kedudukan Waris Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Hukum Perdata**

Menurut Klaassen, Eggens, dan Polak, hak anak tidak sah untuk mewarisi dari orang tua yang menerima mereka, secara teori, setara dengan hak anak sah. Sebagai anak tidak sah yang diakui, mereka berhak atas status ahli waris, yang mencakup kemampuan untuk mencari pembagian warisan, mengajukan petisi heredetatis, dan saissine. Namun, penelitian tambahan mengungkapkan bahwa kesamaan mereka terbatas karena bagian kedua anak di area lain berbeda. Anak tidak sah memiliki hak dan bagian warisan yang berbeda karena mereka berada di bawah perwalian dan bukan kendali orang tua mereka.Pengakuan anak hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dan orang tua yang mengakuinya, tidak termasuk keluarga yang mengakuinya.

### **Bagian-Bagian Ahli Waris Anak Luar Kawin**

* 1. “Bagian Anak luar kawain Jika Mewarisi dari Ahli Waris Golongan1

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 B.W. bagian pertama). Jadi disini diatur perkawinan anak luar kawin bersama-sama dengan golongan I. Dalam hal ini, anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka miliki jika mereka adalah anak sah. Oleh karena itu, untuk menghitung hak bagian anak luar kawin, mereka harus dianggap sebagai anak sah terlebih dahulu. Setelah itu, hak bagian mereka akan dihitung. Misalnya, seorang pewaris meninggalkan banyak harta, tiga anak-anak sah, dan istri hidup terlama. Selain itu, pewaris meninggalkan seorang anak luar kawin diperhitungkan sebagai anak yang sah, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah seperlima. Meskipun demikian, bagiannya untuk anak luar kawin adalah sepertiga kali seperlima sehingga yang diterima oleh anak luar kawin adalah seperlimabelas bagian dari harta peninggalan (Pasal 863 KUH-Perdata). Setelah itu, harta sisa, yang berjumlah empat belas per lima belas bagian, dibagi antara tiga anak anaknya dan istrinya para ahli waris yang sah.[[25]](#footnote-26)

* 1. Bagian anak luar kawin jika mewarisi dari ahli waris golongan II dan golongan III

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah atau suami atau isteri yang hidup terlama, tetapi meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan atau anak luar kawin, berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana pembagiannya? Dalam kasus di mana anak luar kawin mewarisi bersama ahli waris golongan II atau golongan III, anak luar kawin berhak atas setengah atau separoh dari harta warisan, menurut Pasal 863 B.W.

* 1. Bagian anak luar kawin jika mewaris dari ahli waris golongan IV

Jika bagian anak luar kawin mewaris dengan ahli waris yang derajatnya lebih tinggi dari pewaris, bagian anak luar kawin akan semakin besar. Menurut Pasal 863 ayat (1) B.W dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah tiga per empat. Maksud kata “sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh” dalam Pasal 863 ayat (1) B.W tersebut adalah ahli waris golongan IV. Sebagai contoh, jika seorang pewaris tidak meninggalkan saudarasaudara atau orang tuanya, tetapi memiliki paman dan bibi dari pihak bapak atau ibu, atau sepupu atau saudara misan (bahasa Jawa), maka anak-anak luar kawin menerima tiga perempat dari harta warisan. Yang sisa seperempat dibagi antara paman dan bibi, atau keturunannya, atau sepupu atau saudara misan termasuk dalam ahli waris golongan IV”.

Didasarkan pada ketentuan di atas tentang bagian warisan anak luar kawin, dapat disimpulkan bahwa bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin kecil seiring derajat ahli waris sah yang mewaris bersama-sama. Hal ini wajar karena, meskipun anak luar kawin, hubungan mereka dengan pewaris lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III, dan IV, yang merupakan ahli waris yang sah menurut undang-undang. Akibatnya, anak luar kawin akan menerima bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua mereka yang sudah mengakuinya.

* 1. “Bagian anak luar kawain jika menjadi satu satu ahli waris

Dalam Bab sebelumnya membahas kasus di mana anak luar kawin mewarisi bersama-sama dengan ahli waris dari golongan I, II, III, atau IV, serta ahli waris dari golongan yang berlainan derajat. Ada kemungkinan bahwa seorang pewaris hanya meninggalkan anak luar kawin dan tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV. Dalam hal ini, anak luar kawin yang diakui secara sah oleh pewaris akan mewarisi seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W). Dengan pengecualian anak luar kawin yang diakui menurut Pasal 862–866 KUHPerdata, anak luar kawin dianggap tidak sah menurut hukum. Namun, mereka masih dapat memperoleh haknya, tetapi bukan waris, misalnya hibah atau sedekah. Selain itu, anak luar kawin juga berhak atas alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak sumbang dan anak yang dilahirkan dari perzinahan (lihat Pasal 867 BW). Oleh karena itu, khusus anak zina dan anak sumbang, tidak mungkin memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah kandungnya karena undang-undang melarang kedua orang tuanya untuk memberikan pengakuan.

Dalam hal-hal seperti ini yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi perhatian, adalah tanggung jawab aparat negara untuk menangani masalah tersebut dan menjamin kepastian hukum. karena itu melalui saluran undang-undang yang berlaku dan tersedia, tindakan hukum yang digunakan dalam kasus ini Pengujian Regulasi terhadap UU Dasar 1945 adalah merupakan hal yang tepat apabila hukum yang memeriksa dan menguji materil tersebut bertentangan dengan Konstitusi (Dalam kasus ini, diajukan) untuk diuji materil adalah UUP Nomor 1 tahun 1974 pasal 43 ayat 1). Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor: 45/PUU-VIII/2010 untuk memperluas undang-undang yang berkaitan dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang”. Pada dasarnya, keputusan tersebut menyatakan dua hal, yaitu:

1. “Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
2. Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Akibatnya, anak luar kawin memiliki hubungan darah dan perdata dengan ayahnya, selain hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus didukung oleh ilmu pengetahuan, teknologi, atau bukti hukum. Dengan pilihan tersebut, penegakan hukum yang ada menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia dapat memperjuangkan hak-haknya apabila terjadi ketidaksesuaian dalam lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, tindakan hukum pemohon uji materiil sudah tepat. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut melegalkan perzinaan.

Putusan tersebut, di sisi lain, berupaya untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui secara hukum oleh negara. Karena anak-anak yang lahir di luar kawin telah hidup dalam keadaan yang tidak adil dan tidak diakui secara hukum, maka putusan Mahkamah Konstitusi terutama bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang terlantar. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak melegalkan perzinaan; melainkan hanya menegaskan bahwa anak yang lahir dari ayah dan ibu memiliki hubungan perdata. Karena ayahnya tidak mengakuinya, maka anak tersebut tidak dapat menjadi anak kandung (anak di luar kawin). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan bagian dari reformasi hukum saat ini. Putusan tersebut menegaskan “bahwa konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membeda-bedakan manusia satu sama lain seperti yang diatur dan dijamin dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.[[26]](#footnote-27)

### **Hubungan Hukum Anak Terhadap Orang Tua**

Perkawinan melahirkan ikatan hukum dengan anak, dan status anak pun mengikutinya, keduanya diatur oleh hukum.

1. “Anak Sah

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Orang tua wajib memberi nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah,kesehatan,pendidikan,begitu juga dalam hal mewaris. Anak sah dari perkawinan yang otomatis dapat mewrisi dari kedua orangtuanya.

1. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya” dan pasal 43 ayat (2) mengatakan bahwa “kedudukan anak luar kawin itu akan di atur dalam Peraturan Pemerintah”.

Menurut hal tersebut, anak yang belum cukup umur hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya atau anggota keluarga lainnya. Pasal 42, 43 UU Perkawinan, dan Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang tidak mampu hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya dan anggota keluarga lainnya, artinya anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya, begitu pula dalam hal mewaris. Anak yang lahir di luar keluarga hanya dapat diasuh oleh orang tuanya dan saudara kandungnya. Akan tetapi, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengasuhan dan pendidikan anak, maka anak luar keluarga yang diasuhnya mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah. Selain itu, anak dapat mendeteksi adanya ahli waris dan dapat membedakan kedua orang tersebut.[[27]](#footnote-28)

## **Tinjauan Hak Pengakuan dan Status Keperdataan Anak Luar Kawin**

### **Pengakuan Anak Luar Kawin**

Menurut R. Soebekti, ikatan keluarga dan segala konsekuensinya, khususnya hak anak untuk mewarisi dari orang tua yang menerimanya, baru akan terbentuk setelah adanya pengakuan. Keterangan dalam Pasal 272 KUH Perdata mencerminkan hal ini dan mengatakan: “Kecuali anak-anak yang yang dibenihkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undangundang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”. Menurut Pasal 280 KUH Perdata, pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan kedua orang tua anak luar kawin. “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”. Menurut KUH Perdata ada tiga (3) tingkatan status hukum dari anak luar kawin ( Soedharyo Soimin, 1992;41) yaitu :

1. “Anak di luar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua orangtuanya;
2. Anak di luar pekawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orangtuanya;
3. Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orangtuanya melangsungkan perkawinan sah”.[[28]](#footnote-29)

Dari sini jelaslah bahwa anak yang lahir di luar kawin harus mendapat pengakuan dari orang tuanya agar dianggap sah di mata hukum dan berhak atas hak warisnya. Surat pengesahan dari kepala negara merupakan satu-satunya cara untuk melegitimasi anak yang lahir sebelum melakukan perkawinan jika pasangan suami istri tersebut belum mengakui anak tersebut.

Anak luar kawin harus diakui oleh badan yang ditunjuk, dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, dan pengakuan ini dapat dinyatakan dalam akta notaris, akta kelahiran anak, atau akta perkawinan orang tuanya. Menurut J. Satrio, sungguh aneh dan tidak masuk akal jika seorang bayi manusia yang tidak berdosa dan tidak pernah meminta untuk dilahirkan akibat kesalahan orang tuanya harus menjalani proses yang berlarut-larut untuk diakui sebagai anak sah. Selain itu, sering kali terdapat kendala lain yang menghalangi perolehan status tersebut, seperti keengganan Taufik Hidayat untuk mengakui Exel sebagai anaknya. Dalam perkembangannya masalah anak luar kawin perlu pula ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Menurut kerangka yang dianut KUH Perdata, seorang anak dan orang tuanya belum memiliki ikatan keluarga yang semata-mata didasarkan pada keberadaan keturunan. Ikatan keluarga dengan segala percabangannya antara anak dan orang tua yang mengakuinya baru dapat dimulai dengan pengakuan (erkenning). Hubungan perantara antara anak dan orang tuanya berkembang ketika seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan diakui oleh hukum perdata barat.

Pengakuan terhadap anak luar kawin diatur di dalam buku 1 Bab XII Bagian ketiga (pasal 280 - pasal 289) KUHPerdata. “Pengakuan terhadap anak luar kawin menurut ketentuan pasal 280 dapat dilakukan oleh bapak dan/atau ibunya. Berdasarkan ketentuan tersebut KUHPerdata mengenal anak luar kawin terhadap ibunya hal ini berbeda dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya”.

Pengakuan tersebut bertujuan untuk membentuk ikatan hukum (perdata) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya dapat diakui oleh orang dewasa atau orang yang telah berusia 19 tahun, kecuali perempuan yang berusia di bawah 29 tahun. Ayah hanya dapat dituntut untuk mengakui anak luar perkawinan dalam keadaan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 287 ayat (2), sedangkan ibu dituntut untuk mengakui anaknya; jika ibu tidak mengakui anaknya, maka putusan hakim dapat menggantikannya.[[29]](#footnote-30)

Ketentuan pasal 283 melarang pengakuan anak luar kawin yang termasuk dalam kategori anak sedarah dan anak hasil zina. Namun, karena presiden telah memberikan izin, anak hasil zina dapat diakui jika kedua orang tuanya telah melakukan perkawinan. Sementara itu, anak hasil zina sama sekali tidak memiliki peluang untuk diidentifikasi. Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan melalui akta notaris. Jika akta kelahiran anak atau tanggal perkawinan tidak mencantumkan akta yang dibuat oleh Pejabat Catatan Sipil dan dimasukkan ke dalam daftar kelahiran pada hari yang tepat, pengakuan tersebut harus dicantumkan di sisi akta.:

1. “Dalam akte kelahiran anak tersebut;
2. Dalam akte perkawinan bapak dan ibu dari anak tersebut;
3. Dalam akte yang dibuat oleh pegawai catatan sipil;
4. Dalam akte otentik yang dibuat oleh notaris”.

Pasal 284 ayat (1) KUHPerdata mengatakan “pengakuan terhadap seorang anak luar kawin selama hidup ibunya tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya”, dan dalam ayat (2) “jika pengakuan itu dilakukan setelah ibunya meninggal, maka hanya mempunyai akibat hukum pada bapak yang mengakuinya”.

Anak luar kawin dan orang tua yang mengakuinya, maka terjadilah hubungan perdata karena pengakuan tersebut (Pasal 280 KUH Perdata). Dengan demikian, maka status anak luar kawin yang diakui terbentuk melalui pengakuan tersebut, yang berakibat pada :

1. “Orang tua harus memberikan ijin kawin bagi anak luar kawin yang belum dewasa (pasal 391 KUHPerdata);
2. Timbulnya kewajiban timbal balik antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakui (pasal 328 KUHPerdata);
3. Adanya perwalian atas anak (pasal 353 KUHPerdata);
4. Adanya hak mewaris (pasal 863 KUHPerdata) dan Legitime Portie (Pasal 916 KUHPerdata);
5. Akibat-akibat lain yang timbul dengan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya”.

Sedangkan, menurut Pasal 285 KUH Perdata, pengakuan suami atau istri selama perkawinan atas kebahagiaan anak luar kawin yang dikandung dengan orang lain sebelum perkawinan, tidak akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maupun anak hasil perkawinan mereka. Menurut Pasal 285 KUH Perdata, jika ada anak sah dari perkawinan yang sedang berlangsung, anak luar kawin tersebut tidak berhak atas harta warisan ayah dan ibu.Perhubungan kekeluargaan antar anak keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya hanya dapat diletakkan dengan apa yang dikenal dengan pengesahan anak *(wettiging)* dan perbuatan ini adalah suatu langkah lebih lanjut lagi dari pada pengakuan. Pasal 272 KUHPerdata menentukan bahwa kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akte perkawinan sendiri.

Anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan dan kedua orang tuanya tidak mampu melangsungkan perkawinan karena salah satu di antara mereka masih terikat perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak hasil zina. Anak jenis ini tidak dapat diakui oleh hukum. Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hal tersebut, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari zina atau sebagai hasil pemberian tidak dapat memperoleh pengakuan sama sekali. Anak yang melakukan zina tidak berhak memperoleh warisan dari kedua orang tuanya. Hukum hanya memberikan bantuan kepada kedua orang tuanya sesuai dengan kebutuhannya. Besarnya bantuan ditentukan oleh kemampuan ibu atau ayah dan disesuaikan dengan jumlah dan kesehatan ahli waris yang sah.

### **Status Keperdataan Anak Luar Kawin**

Penerapan asas perkawinan monogami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdampak signifikan terhadap pengaturan anak luar kawin dalam hubungan keluarga dengan orang tuanya. Anggapan bahwa anak luar kawin dan orang tua kandungnya tidak dapat mengadakan hubungan perdata dengan sendirinya dianut oleh Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, secara hukum, seorang anak tidak mempunyai orang tua jika orang tua tersebut tidak mengakui keberadaannya. Menurut ketentuan Pasal 272 dan 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya anak hasil zina dan anak luar kawin (yang ditandai dengan bercak darah) tidak dapat dikukuhkan statusnya melalui perkawinan atau pengakuan orang tua, kecuali dalam Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[[30]](#footnote-31)

Ketika hukum mengakui anak luar kawin, maka anak tersebut memperoleh kedudukan hukum perdata baru, sehingga tercipta kedudukan hukum baru (konstitutif). Kedudukan hukum baru ini menyebabkan munculnya hak waris dan hak perdata lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara anak sah dan anak luar kawin. Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang lahir atau dibesarkan dalam perkawinan dianggap sebagai anak sah. Jika anak tersebut lahir setelah perkawinan, maka anak tersebut dikatakan lahir dalam perkawinan. Anak yang dibesarkan dalam ikatan perkawinan, di sisi lain, adalah anak yang dibesarkan dalam ikatan perkawinan; sebagai akibatnya, anak tersebut tetap memiliki kedudukan sebagai anak sah bahkan dalam kasus perceraian atau kematian.[[31]](#footnote-32)

### **Hak Keperdataan Anak Luar Kawin**

Selain hak-hak sipil dan kebebasan, setiap anak mempunyai hak atas partisipasi, pertumbuhan dan perkembangan, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.[[32]](#footnote-33) Sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh undang-undang, orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menegakkan dan memelihara hak asasi manusia tersebut. Sejalan dengan itu, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan aksesibilitas bagi anak dalam rangka penyelenggaraan keselamatan anak, khususnya dalam menjamin tumbuh kembangnya yang optimal dan terarah. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2), setiap anak mempunyai hak normatif untuk hidup, tumbuh kembang, dan hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan.

Waluyadi mengemukakan, hak-hak anak diantaranya adalah sebagai berikut: “Hak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara; Hak anak sejak dalam kandungan untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; Hak anak sejak kelahirannya atas suatu nama dan status kewarganegaraan; Hak anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali; Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua”. “Hak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.[[33]](#footnote-34)

Perkembangan mental dan spiritual anak luar kawin tentu terganggu karena stigma yang melekat pada mereka. Secara hukum, anak yang lahir di luar perkawinan luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dan darah dengan ibunya. Artinya, laki-laki yang melahirkan anak tersebut dibebaskan dari segala kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak anak. Sementara itu, anak tersebut akan mengalami tekanan psikologis, penolakan sosial, dan kesulitan finansial terkait kesehatan, pendidikan, dan aspek-aspek lain dari pemeliharaan fisik. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dapat memperoleh hak-haknya sebagai anak kandung berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menjamin tumbuh kembangnya tidak terganggu.

## **Tinjauan Pengertian Perkawinan dan Pengesahan Anak**

### **Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia. Dikatakan sakral karena perkawinan yang akan dilakukan mempunyai kekuatan atau hubungan yang sangat erat dengan agama berikut aspek kerohaniaannya, hal ini disebabkan karena suatu perkawinan bukan hanya hubungan jasmaniahnya saja tetapi hubungan bathiniah mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan.[[34]](#footnote-35)

Tuhan menciptakan manusia untuk saling mengenal satu sama lain. Manusia diciptakan berpasang-pasangan, yaitu pria dan wanita. Dengan saling mengenal akan timbul rasa kasih sayang diantara mereka. Dari rasa kasih sayang akan timbul rasa saling membutuhkan. Mereka akan melakukan perkawinan, dimana pria dan wanita tersebut berjanji untuk hidup bersama dan melanjutkan keturunan.

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti “Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dlam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi”.[[35]](#footnote-36)

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, “perkawinan adalah sebuah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal ini, tersirat bahwa perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita saja”. Selanjutnya, dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak”.

Salah satu peristiwa kehidupan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap status hukum seseorang adalah perkawinan. Oleh karena itu, agar perkawinan dianggap sah menurut hukum positif dan hukum agama, maka perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengenai lembaga perkawinan membentuk undangundang Perkawinan telah mengeluarkan sebuah undang-undang yaitu undang-undang No.1 Tahun 1974. Dalam rumusan pasal tersebut, dapat dirinci dalam beberapa unsur, diantaranya :[[36]](#footnote-37)

1. “Adanya ikatan lahir batin Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita.
2. Antara seorang pria dan wanita Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.
3. Sebagai suami-isteri Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.
4. Adanya tujuan Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama dalam segala aspek kerohaniannya, disini dapat dilihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama, sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama”.

Pada dasarnya, tidak semua pasangan calon suami-isteri dapat melangsungkan perkawinan, hanya pasangan yang sudah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja yang dapat melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkawinan Tahun 1974. Di dalam ketentuan tersebut ditentukan dua syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern.

Syarat intern adalah syarat-syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Adapun syarat-syarat tersebut akan diuraikan secara garis besar sebagai berikut: “a. Persetujuan kedua belah pihak; b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun; c. Pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari Pengadilan atau Camat atau Bupati; d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin”.

Sedangkan mengenai syarat-syarat ekstern suatu perkawinan pada dasarnya adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas - formalitas dalam pelaksanaan perkawinan, yang meliputi: “a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Kawin Talak dan Rujuk. b. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat yang memuat: 1) Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu. 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan”.

Selain bebas dari halangan, sesuatu dianggap sah jika memenuhi semua rukun dan syarat. Jika tidak, maka dianggap hampa atau hanya kepura-puraan. Suatu perbuatan hukum yang sah disertai dengan konsekuensi hukum, seperti hak dan kewajiban. Perbuatan hukum dalam perkawinan pun tidak berbeda. Hak untuk berinteraksi sebagai suami istri, hak untuk mewarisi, kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anak, dan hak-hak lainnya, semuanya merupakan hasil dari perkawinan yang sah. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu : “1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Dengan demikian, apabila perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tujuan dari ketentuan yang berlaku dalam agama dan kepercayaan masing-masing tercantum dalam ketentuan agama dan kepercayaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan agamanya, maka perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai suatu akad perkawinan.[[37]](#footnote-38)

### **Tinjauan Umum Pengesahan Anak**

Setiap anak mempunyai hak dan status hukum yang sama, serta berhak atas perlindungan dan kewajiban hukum dari orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Karena setiap kelahiran adalah peristiwa hukum, maka harus dicatat sebagai peristiwa perkawinan atau kematian untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum.[[38]](#footnote-39)

Karena peristiwa hukum ini menjadi titik tolak bagi hak dan kewajiban tambahan, seperti hak mewaris, kewajiban orang tua untuk mengasuh dan memelihara anaknya, hibah, wasiat, status mahram, dan sebagainya. Pengertian pengesahan anak menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”) adalah:

“Pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.” Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 ayat (1), “Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan”. Kemudian dalam pasal Pasal 49 ayat (2), “Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara”.

Akibat hukum dari pengesahan adalah bahwa anak yang disahkan tunduk pada ketentuan hukum yang sama sehingga anak itu lahir selama perkawinan, yang berarti bahwa anak itu dalam kedudukan yang sama dengan anak yang lahir selama perkawinan yang sah. Anak-anak ini diberikan status hukum anak sah, tidak hanya oleh orang tuanya, tetapi juga oleh kerabat orang tuanya.[[39]](#footnote-40)

1. Yuli Hilmasari. (2014). Pengakuan Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata. *Skripsi Sarjana Hukum: UIN Makassar*. [↑](#footnote-ref-2)
2. Sahara, Elfi, et al.(2013). *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia., hlm. 5. [↑](#footnote-ref-3)
3. SriRezeki, (2009). Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer: 20/PDT. P/2009/PN. JKT. PST). *Skripsi: Universitas Indonesia*., hlm. 1. [↑](#footnote-ref-4)
4. Pengadilan Agama Purwodadi, “Analisis MaqâṢid Asy-syarîah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-vIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/210-analisis-maqa-id-asy-syari-ah-terhadap-putusan-mk-nomor-46-puu-viii-2010-dan-implikasinya-terhadap-hukum-keluarga-islam-di-indonesia> Diakses pada 11 Januari 2025 Pukul 09.58 [↑](#footnote-ref-5)
5. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 <https://bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf> Diakses pada 11 Januari 2025 Pukul 11.09. [↑](#footnote-ref-6)
6. Gani, Ruslan Abdul, (2018). Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam). *Al-Risalah*, *11*(01), hlm. 84-109. [↑](#footnote-ref-7)
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <https://www.kemenpppa.go.id/> diakses pada 04 Januari 2025 Pukul 11.13. [↑](#footnote-ref-8)
8. Sandra Bowontari. (2019). Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya. *Lex Privatum*, *7*(4)., hlm.5. [↑](#footnote-ref-9)
9. Yuli Hilmasari. (2014). Pengakuan Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata. *Skripsi Sarjana Hukum: UIN Makassar*. [↑](#footnote-ref-10)
10. SriRezeki, (2009). Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer: 20/PDT. P/2009/PN. JKT. PST). *Skripsi: Universitas Indonesia* [↑](#footnote-ref-11)
11. Yahya Ibadu Rahman, and Zainal Abidin. (2024). Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, *5*(2), [↑](#footnote-ref-12)
12. Hamzani, A. I., Idayanti, S., & Widyastuti, T. V. (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Tanah Air Beta [↑](#footnote-ref-13)
13. Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*. [↑](#footnote-ref-14)
14. Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2024). Implementation Approach In Legal Research, Vol. 13 No. 2 (2024).. <http://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>.. [↑](#footnote-ref-15)
15. Widyastuti, T. V., Marsisno, W., Udin, A. F., & Sutaguna, I. N. T. (2024). *Penelitian Transformatif; Mengatasi Isu-Isu Kontemporer Dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif.* Media Penerbit Indonesia [↑](#footnote-ref-16)
16. Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyo, H. (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Transparansi Hukum*, *2*(2). [↑](#footnote-ref-17)
17. Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 42-43. [↑](#footnote-ref-18)
18. Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, *2*(2), 297-308. [↑](#footnote-ref-19)
19. Paul Scholten, (1998), Seri Asser, Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgelijk Recht, Jilid 1, Inleiding-Personenrecht, cetakan IV, Tjeenk Willink, Zwolle, hlm. 386 [↑](#footnote-ref-20)
20. Sri Rezeki. (2009). Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer: 20/PDT. P/2009/PN. JKT. PST). *Skripsi: Universitas Indonesia*. hlm. 17 [↑](#footnote-ref-21)
21. Andy Hartanto. (2018). *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakad Media Publishing. hlm. 26-27. [↑](#footnote-ref-22)
22. Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, (2022). Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *4*(1), hlm. 160-161. [↑](#footnote-ref-23)
23. [Nafiatul Munawaroh](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/nafiatul-munawaroh--sh--mh-lt627b7907691c3/), “Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin” , Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382/> Diakses pada 28 Desember 2024 [↑](#footnote-ref-24)
24. Hilmasari, Y. (2014). Pengakuan Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata. *Skripsi Sarjana Hukum: UIN Makassar*., hlm. 34. [↑](#footnote-ref-25)
25. Winarso, C., Marfu’atun, D. R., Santy Fitnawati, W. N., & Fauzan, A. (2024). Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, *1*(3), 358-366. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
27. Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati. (2005), “*Hukum Perorangan dan kekeluargaan Perdata”* , Jakarta : Gitama Jaya Jakarta, hlm 80 [↑](#footnote-ref-28)
28. Maria Yosepin Endah Listyowati, Ferry Fauzi, Teguh Rahayu, (2023), “Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata,” JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1626> hlm. 46. [↑](#footnote-ref-29)
29. [R. Soetojo Prawirohamidjojo](https://library.stik-ptik.ac.id/hasilcari?query=100:%20%22R.%20Soetojo%20Prawirohamidjojo%22), [Asis Safioedin](https://library.stik-ptik.ac.id/hasilcari?query=700:%20%22Asis%20Safioedin%22). (1986), "Hukum orang dan keluarga.", Bandung : Alumni., hlm. 141 [↑](#footnote-ref-30)
30. D.Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm. 106 -107. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid.*, hlm. 108 - 109 [↑](#footnote-ref-32)
32. Rita Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti. hlm. 38 [↑](#footnote-ref-33)
33. Waluyadi, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Rafika Aditya Bakti. hlm. 19. [↑](#footnote-ref-34)
34. Abdul Kadir Muhammad. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti. hlm. 290 [↑](#footnote-ref-35)
35. Taufiq, R. R. (2016). *Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus (Nomor 0007/Pdt. P/2015/Pa. Kds) Tentang Wali Adhal* (Doctoral Dissertation, Stain Kudus). hlm. 16. [↑](#footnote-ref-36)
36. Widanarti, H. (2020). Kesadaran Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Dan Pembatalan Perkawinan. *Law, Development and Justice Review*, *3*(2), hlm. 179-190. [↑](#footnote-ref-37)
37. Hilman Hadikusuma, (1990). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, hlm. 34 [↑](#footnote-ref-38)
38. Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(2), 111-132. [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-40)